

**Interupsi Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke – 25
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022
Selasa, 14 Juni 2022**

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.11 WIB)

Nama	Pernyataan	Keterangan
drh. H. SLAMET A-431/F-PKS/Dapil: Jawa Barat IV	<p>Interupsi Pimpinan. Sedikit Pimpinan, Interupsi. Tidak lebih dari dua menit Pimpinan.</p> <p>Baik, terima kasih Pak Ketua, Ibu Ketua Dewan yang saya hormati. <i>Bismillahirrahmanirrahiim</i> <i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i> Perkenalkan saya Slamet A-431 dari Fraksi PKS Dapil Jawa Barat IV Kokab Sukabumi.</p> <p><i>Alhamdulillah</i> terima kasih atas izin nya kepada Ibu Ketua DPR RI, Bapak Pimpinan Wakil Ketua DPR RI dan seluruh Anggota Dewan yang saya hormati.</p> <p>Pada tahun 1990 merupakan tonggak sejarah bagi dunia kesehatan hewan di Indonesia yang mana melalui resolusi badan kesehatan dunia nomor 9 Indonesia secara resmi dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku yang sering kita kenal dengan PMK, namun penyakit ini kembali ditemukan menyerang ternak sapi milik masyarakat yang ini artinya selama 32 tahun Indonesia bebas PMK tercoreng akibat oleh segelintir oligarki yang bermain dibelakang importasi hewan dan produk peternakan selama ini. Masuknya wabah penyakit ini jika tidak segera ditangani maka akan memberikan dampak pengguna yang sangat besar khususnya bagi peternakan rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.</p>	

Nama	Pernyataan	Keterangan
	<p>Carut-marut tata kelola peternakan nasional sebenarnya hanya akses dari buruknya pengelolaan sector pangan dalam negeri, tumpang tindih kewenangan dan sulitnya melakukan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga adalah kejadian lumrah yang sering kita jumpai di negeri ini. Undang-Undang Cipta Kerja yang Pemerintah anggap sebagai jalan keluar bagi kekuatan nasional justru semakin menunjukkan kelemahannya dengan semakin berputarnya mekanisme importasi hewan dan produk ternak Indonesia.</p> <p>Oleh karena itu kami menuntut beberapa hal untuk disampaikan melalui pimpinan kepada Pemerintah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami ingin meminta ke Pemerintah untuk bergerak cepat menghentikan penyebaran wabah PMK di Indonesia melalui pengendalian pola importasi hewan dan produk ternak khususnya yang berasal dari Negara-negara yang belum dinyatakan bebas PMK serta mengusut tuntas persoalan dibalik mewabahnya PMK di Indonesia. 2. Kami meminta Pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk segera melakukan alokasi anggaran....bagi penanganan wabah PMK melalui pencairan dana <i>automatic adjustment</i> milik Kementerian Pertanian sekitar 1,4 Triliyun Rupiah. 3. Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara mencapai 466 Triliyun yang sekitar 20% biayanya bersumber dari APBN bahkan Kementerian Keuangan telah menganggarkan 23 Triliyun Rupiah untuk IKN pada tahun 2023. <p>Ini artinya dengan porsi anggaran seperti ini tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk mengatakan tidak punya anggaran untuk penanganan PMK. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk mengatakan tidak punya anggaran bagi penanganan PMK yang hanya membutuhkan kurang lebih sekitar 4,2 Triliyun Rupiah.</p>	

Nama	Pernyataan	Keterangan
	Demikian Pimpinan yang saya sampaikan, atas perhatian terima kasih. <i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>	

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.33 WIB)

Jakarta, 14 Juni 2022
Kepala Bagian Persidangan Paripurna,



Rachmi Suprihartanti Septiningtiyas, S.H., M.H.
NIP. 196709251994032003